

11

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	
<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 5 TAHUN 2004	

Garap bisnis BBM

7 Investor tanam US\$345 juta

JAKARTA (Bisnis): Sebanyak tujuh perusahaan pemegang izin prinsip sektor hilir migas Indonesia menyiapkan investasi US\$345,4 juta untuk menggarap bisnis distribusi BBM.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono menyebutkan dari sembilan perusahaan asing dan domestik yang sudah mengantongi izin prinsip untuk usaha minyak nasional itu, tujuh di antaranya sudah menyampaikan nominal modal yang akan ditanamkannya.

"Cukup banyak. Ini daftarnya ada. Tapi kami belum terima [informasi nominal investasi] dari JAS [PT Jasa Angkasa Semesta] dan Petronas [Petroleum Nasional Berhad, Malaysia]," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI di Jakarta kemarin.

Selain dua perusahaan itu, dia mengungkapkan tujuh perusahaan lain yang sudah menyampaikan kesiapan investasinya adalah PT Sigma Rancang Perdana, PT Kridapetra Graha, PT Petroleum Limas, PT Elnusa Harapan, PT Pandu Selaras (Petros), PT Elnusa Petrofin, dan PT Raven Sejahtera.

Menurut Tubagus, izin atau persetujuan prinsip yang berlaku dua tahun sejak 2002 itu sudah memungkinkan investor tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, seperti membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dan fasilitas penyimpanan.

Selain di hilir minyak, BPH Migas diketahui juga mengeluarkan izin prinsip kepada 12 perusahaan lokal maupun asing yang berminat di usaha distribusi gas. Perusahaan itu a.l. PT Energasindo Heksa Karya, Igas Utama, Mitra Energi Buana, Rabana Gasindo Makmur, Sadikun Niaga

Rencana investasi perusahaan pemegang izin prinsip bisnis hilir migas (US\$, juta)	
Perusahaan	Investasi
PT Sigma Rancang Perdana	250
PT Kridapetra Graha	75
PT Petroleum Limas	9,8
PT Elnusa Harapan	4
PT Pandu Selaras (Petros)	4
PT Elnusa Petrofin	1,3
PT Raven Sejahtera	1,3

Sumber: BPH Migas

Bisnis/bp

Mas Raya, Banten Inti Gasindo, Tata Kasih Internasional, Mitra Media Datanusa, dan Persada Kriya Dwiguna.

Namun, hingga saat ini badan tersebut belum menerima laporan nominal investasi yang akan dikurkannya perusahaan itu.

RPP Hilir

Terkait dengan revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPPH hilir, dia menegaskan hal itu tidak ada hubungan langsung dengan keterlibatan investor. "Kenyataannya mereka sudah banyak siap, boleh dibilang kita tinggal angkat bendera start, mereka langsung masuk."

Tubagus menjelaskan revisi RPP itu meninjau ulang BBM jenis tertentu, cadangan operasional, serta mekanisme pengawasan distribusi komoditas minyak dan gas yang disesuaikan dengan UU Migas.

"Itu sudah kami selesaikan di internal Departemen ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], BPH Migas, Dirjen Migas. Dan sekarang sudah dikembalikan ke Setneg [Sekretariat Negara]. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa keluar." (06)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2004

Pertamina & EMOI bahas blok Cepu

JAKARTA (Bisnis): Pertamina dan ExxonMobil Oil Indonesia Inc akan mengadakan pertemuan hari ini. Agenda itu diduga terkait permintaan perusahaan asing untuk memperpanjang kontrak operasi migas blok Cepu setelah 2010 yang ditolak Pertamina.

"Dia [EMOI] mau ketemu besok [hari ini], nanti kami [dengar] *ngomong* apa. Saya belum tau, kami mau dengarkan dulu apa sih?" kata Dirut PT Pertamina Widya Purnama usai menghadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta ke-

marin.

Sementara itu, dia menjelaskan pertemuannya dengan Menteri ESDM kemarin tidak secara khusus membahas persoalan blok Cepu tersebut. Hal itu, tuturnya, hanya pelaporan rutin yang biasa dilakukan.

Di lain pihak, juru bicara ExxonMobil, Deva Rachman, kepada *Bisnis* mengatakan pihaknya belum dapat memberikan konfirmasi apapun terkait dengan rencana pertemuan perusahaan dengan pihak Pertamina. "Saya belum dapat jadwalnya." (06)

6

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : T 7											TAHUN 2004																			

Peran BPK dalam kasus KBC

Oleh Tumpal W. Sitorus

Auditor eksternal pada pelaksana BPK-RI

Mantan tim ahli hukum Pertamina Maqdir Ismail dan mantan negosiator kontrak LNG Ramses Hutapea dalam diskusi tentang klaim Karaha Bodas Company (KBC) awa Agustus di Jakarta mengatakan auditor independen sesungguhnya dapat menilai apakah dalam proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas terdapat unsur pengeluaran yang tidak wajar.

Hal menarik dari kasus ini, PT (Persero) Pertamina sebagai salah satu pihak penandatanganan kontrak keberatan membayar klaim senilai US\$294 juta (atau setara dengan Rp2,6 triliun) dan meminta pemerintah Indonesia membayar klaim tersebut.

Mengapa menarik? Pertama, mantan negosiator kontrak LNG dan mantan Tim Ahli Hukum Pertamina itu berbicara tentang peranan auditor independen pada permasalahan Pertamina (salah satu BUMN) dan pemerintah.

Berarti secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, mereka menanyakan kemana sekarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri itu. Masih berperankah?

Sesuai dengan konstitusi (Amendemen UUD 1945), UU Keuangan Negara, dan UU BUMN, BPK selaku lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri memiliki peran sentral dalam pemeriksaan keuangan negara, termasuk keuangan BUMN.

Pertanyaannya, sejauh mana peran BPK dalam kasus ini dan keberaniannya keluar dari belenggu pembatasan dalam melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya dibidang BUMN?

Kedua, standar pemeriksaan dengan tujuan untuk menilai apakah dalam proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas terdapat unsur pengeluaran yang tidak wajar sesungguhnya terdapat dalam Standar Audit Pemerintah (SAP).

Bagaimana cara mendobrak agar BPK segera turun membongkar kasus berskala nasional

dan internasional yang berimplikasi kepada kepentingan nasional?

Bila pemeriksaan dilakukan, sekurang-kurangnya BPK menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap bela negara dan wujud penghargaan kepada pendiri Republik ini yang telah mengamankan BPK dalam konstitusi sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri (*Supreme Audit Institution*).

Lebih dari itu, merupakan tantangan menarik bagi pejabat fungsional auditor keuangan negara yang memperhatikan dengan serius setiap indikasi masalah (baca: bibit temuan) berskala nasional dan internasional yang berimplikasi kepada kepentingan nasional.

Ketiga, sejauhmana hubungan Presiden RI, DPR-RI, dan BPK-RI agar BPK-RI mampu sepenuhnya melaksanakan panggilan tugas dan wewenang konstitusional?

Agar arah penyelamatan kekayaan negara berjalan, perlulah kiranya publik mengetahui esensi auditor independen berikut standar profesi BPK (SAP), dan pentingnya sensitivitas pejabat negara dalam menjaga kekayaan negara dan BUMN yang selalu saja mengalami pendarahan (hilang percuma), lagi-lagi, tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab.

Auditor independen

Sesuai dengan mandat konstitusi, auditor independen (baca: auditor eksternal) dalam hal pemeriksaan keuangan negara adalah BPK. Selain itu, di sektor swasta, kita juga mengenal profesi akuntan atau auditor independen yang berhimpun dalam ikatan profesi akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sementara itu, sebagian para pelaksana BPK adalah juga akuntan dengan register negara.

Dengan demikian, BPK seharusnya dalam posisi yang paling berkepentingan (baca: peka dan kritis) dalam menilai apakah dalam proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas terdapat unsur pengeluaran yang tidak wajar.

Lalu bagaimana Standar Audit Pemerintah (SAP) mengatur hal tersebut?

Hal yang menyejukkan dalam standar audit ini bagi seorang profesional auditor di bidang keuangan negara dan BUMN adalah para auditor dapat membantu para pejabat pemerintah atau pihak lain dalam memahami tanggung jawab auditor.

Tanggung jawab auditor antara lain, audit dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan dan dilaksanakan secara independen.

Berdasarkan SAP, audit—katakanlah—atas proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas, dapat dengan tujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan akuntabil-

itas pemerintah (baca: apakah dalam proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas terdapat unsur pengeluaran yang tidak wajar).

Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan koreksi (baca: apakah tepat pemerintah, pada akhirnya, yang membayar tuntutan ganti rugi tersebut?)

Dari segi pelaporan, berdasarkan SAP 8.26, auditor (baca: auditor independen) harus melaporkan semua mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan dan semua kejadian penyalahgunaan wewenang signifikan yang ditemukan selama atau dalam hubungannya dengan audit:

Contoh dari kejadian penyalahgunaan wewenang adalah bila ditemukan bukti adanya unsur pengeluaran yang tidak wajar.

Berdasarkan SAP 8.30, dalam keadaan tertentu, auditor (baca: auditor independen) harus secara langsung melaporkan adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas yang diaudit (instansi kepolisian dan atau kejaksaan).

Pejabat negara

Sesuai dengan UU No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, salah satu tugas Pimpinan MPR dan DPR adalah mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya. Salah satu pimpinan lembaga negara lainnya adalah BPK.

DPR mempunyai fungsi antara lain pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945 (antara lain, adakah hambatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri?), undang-undang (antara lain UU Keuangan Negara), dan peraturan pelaksanaannya.

DPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Salah satu aspirasi masyarakat yang mengemuka adalah aspirasi mantan Tim Ahli Hukum Pertamina dan mantan negosiator kontrak LNG tersebut di atas.

Dengan demikian, katakanlah, melalui kerja sama dengan DPR, BPK dapat segera turun melaksanakan tugas negara dalam upaya membuktikan ada tidaknya unsur KKN dalam kontrak.

Penutup, adakah skenario pejabat negara kita yang terkait yang mampu menyelamatkan kekayaan negara di luar peran strategis BPK?

Adakah, belum terpikirkan, atau memang sengaja membonsai gerak idealisme BPK yang seharusnya?

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: 5 TAHUN 2004

EKSPLORASI

OPEC: Harga minyak masih berfluktuasi

AMLAPURA, Bali (Bisnis): Harga minyak dunia masih akan berfluktuasi meskipun kecenderungannya belakangan ini mulai menurun. Pergerakan itu bukan disebabkan permintaan dan penawaran, melainkan lantaran faktor psikologis.

Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Purnomo Yusgiantoro mengatakan kendati permintaan China kepada pasar minyak dunia tetap besar, namun masih ada kekhawatiran suplai dari Rusia dan Irak menurun.

"Dari Irak, misalnya, Pasokannya masih terganggu karena hingga saat ini terus terjadi pemboman," katanya di sela-sela pertemuan sejumlah calon investor migas internasional di Amlapura, Karangasem, Senin malam.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu, saat ini minyak dunia itu sudah kelebihan pasok 1,5 juta barel. "Kalau harga masih tinggi, itu di luar kewajaran. Kan lucu itu, mestinya harga turun. Jadi saya lihat ada faktor lain yang mempengaruhi harga ini, yakni faktor psikologis."

Purnomo juga melihat faktor ketakutan akan terorisme ikut mempengaruhi harga minyak dunia tersebut. Kenyataan ini kemudian dimanfaatkan oleh para spekulasi untuk memainkan harga. (k2)

8

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 HALAMAN: 9
 TAHUN 2004

Politik Minyak dan Konflik Internasional

DIPLOMASI

MASALAH minyak dan konflik internasional masih mendominasi wacana global dalam beberapa hari ini. Minggu lalu, misalnya, harga minyak sempat menyentuh rekor tertinggi mendekati 50 dolar per barel. Meskipun minggu ini sudah "turun" ke level 43 dolar per barel, namun kekhawatiran bahwa harga minyak akan mengejutkan lagi, tetap masih ada.



NANANG PAMUJI M

Fluktuasi harga minyak dunia terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi keamanan Irak yang belum stabil. Meskipun konflik di Najaf, Irak sudah surut-setidaknya untuk sementara-namun perang pembebasan Irak dari genggaman AS masih tetap berlangsung. Beberapa hari lalu, sebuah pipa minyak di Basrah diledakkan. Pipa itu sangat strategis karena menjadi kunci penyaluran ekspor dari pengilangan minyak terbesar di Ramallah.

Selain faktor Irak, industrialisasi di Cina dan India membuat kedua negara itu

makin "haus" akan kebutuhan energi yang makin besar dari tahun ke tahun. Apa dampak dari kenaikan harga minyak itu terhadap konstelasi politik internasional saat ini?

Sejarah menunjukkan, selama beberapa dasawarsa belakangan, masalah minyak menjadi pemicu konflik yang sangat penting. Salah satu bukti konkretnya adalah invasi AS yang kini menghasilkan situasi politik yang makin tidak menentu di Irak. Meskipun dibungkus atas nama demokrasi, antiterorisme ataupun antisenjata pemusnah massal, motivasi terpenting dalam invasi AS adalah minyak.

Itu terlihat dari ketergantungan AS terhadap minyak di Timur Tengah. Walaupun negara-negara industri maju, terutama AS, telah berupaya keras untuk mendiversifikasikan sumber impor minyak mereka, namun ketergantungan terhadap Timur Tengah -atau Teluk Persia khususnya - masih cukup besar. Sekitar 30 persen produksi

minyak dunia berada di Timur Tengah dan diperkirakan potensi kandungan minyak di kawasan itu mencapai dua pertiga potensi yang dimiliki seluruh dunia.

Tahun 1960-an, setiap tahunnya rata-rata ditemukan sumber minyak sebesar 47 miliar barel, yang sebagian besar berada di Timur Tengah. Namun dengan makin besarnya kecenderungan nasionalisasi perusahaan minyak di negara-negara OPEC, banyak perusahaan minyak Barat berupaya untuk menemukan sumber minyak di kawasan lain. Hasilnya, tahun 1970-an, volume temuan sumber minyak baru turun menjadi 35 miliar barel per tahun. Tahun 1980-an dan 1990-an, volume itu makin merosot menjadi masing-masing 24 miliar barel dan kemudian 14 miliar barel per tahun. Ini memperlihatkan, Timur Tengah tetap sumber minyak terpenting.

Situasi itu jelas menjadi alasan mengapa Timur Tengah menjadi agenda tinggi politik luar negeri AS. Washington terus berupaya untuk menjadikan kawasan ini sebagai wilayah kekuasaan politik dan militernya. Tahun 1985-1988, Arab Saudi, Irak dan Iran merupakan sekutu penting AS di kawasan itu. Dari sekitar 155 miliar dolar ekspor senjata AS ke semua ne-

gara berkembang, 31,8 miliar ke Arab Saudi dan 31,2 milyar ke Iran dan Irak.

Perubahan politik di Iran dan Irak membuat situasinya berubah drastis pada tahun 1990-an. Pada periode 1990-1993, ekspor senjata ke Arab Saudi meningkat menjadi 37,6 miliar dolar, sedangkan ke Iran dan Irak hanya 8,5 miliar dolar. Periode 1994-1998, jumlah ekspor senjata AS ke Arab Saudi tetap tinggi, yaitu US\$48,5 miliar sedangkan ke Iran-Irak merosot menjadi US\$ 2,1 miliar. Tahun berikutnya sampai dengan tahun 2001, Arab Saudi menerima senjata AS senilai US\$ 37,4 miliar, sedangkan Iran-Irak hanya US\$ 0,9 miliar.

Perubahan rezim politik di Iran membuat Washington memalingkan dukungan ke Saddam Husein dalam perang Irak-Iran sejak 1980. Pada era Presiden Ronald Reagan, ketika makin terlihat bahwa Irak mengalami kekalahan dalam berbagai front pertempuran, AS memberikan bantuan ke rezim Saddam dalam bentuk kredit komoditas, jaminan utang, pengiriman senjata secara rahasia, dan juga informasi intelijen tentang pasukan Iran.

Invasi Irak ke Kuwait sebenarnya membuat AS, secara politik, sangat dilematis. Kepentingan AS terhadap minyak Irak tetap tinggi, sedangkan secara politik dan

militer harus mendukung posisi Kuwait. Selama masa sanksi PBB setelah Perang Teluk berakhir, perusahaan minyak AS praktis tersingkir dari rencana strategis pemerintah Saddam. Dalam rancangan kebijakan perminyakan nasional Irak Saddam, perusahaan minyak dari Rusia, Prancis dan Cina menduduki peringkat teratas sebagai calon pengelola minyak Iran, apabila sanksi PBB dicabut.

Ini ditambah dengan kenyataan bahwa prestasi AS dalam mengontrol ketergantungan dari impor minyak tidaklah sebaik Eropa. Akibat keberhasilan dalam eksplorasi minyak di Laut Utara, impor minyak Eropa bisa ditekan sampai sekitar 8 persen saja. Namun ketergantungan minyak AS makin besar. Sejak tahun 2001, untuk pertama kalinya AS mengimpor minyak dari Teluk Persia lebih besar dari impor negara-negara Eropa.

Dalam perspektif politik minyak, serangan militer untuk menguasai Irak menjadi opsi yang paling realistis. Dengan resolusi DK-PBB 1483 Mei 2003 yang mencabut sanksi ekonomi terhadap Irak, kini perusahaan AS menguasai pengelolaan minyak sampai tahun 2007. Bahkan Pentagon, tahun lalu telah mengumumkan bahwa perusahaan Prancis, Jerman dan Rusia dilarang ikut ten-

der minyak yang dibiayai AS dengan alasan "melindungi keamanan esensial AS".

Pengaruh AS

Tidak dapat dipungkiri, pengaruh AS menjadi sangat penting dalam menentukan signifikansi politik minyak dalam konstelasi politik internasional kontemporer. Jauh sebelum serangan teror 9/11, ketika Bush mengambil alih kekuasaan di AS, negara itu sedang mengalami krisis energi. Itulah sebabnya Bush membentuk National Energy Policy Development Group (NEPDG) yang tugasnya merancang kebijakan guna memenuhi kebutuhan energi AS. Ketua lembaga itu adalah Wapres Dick Cheney, karena dia sebelumnya menjadi *chief executive* dari Halliburton Co., sebuah perusahaan jasa dalam penambangan minyak.

Dalam perhitungan kelompok itu, produksi minyak domestik AS akan berkurang: sekitar 8,5 juta barel per hari (mbd, million barrels per day) pada tahun 2002 menjadi hanya 7 mbd pada tahun 2020. Sementara itu konsumsi minyak domestik naik dari 19,5 mbd menjadi 25,5 mbd dalam periode yang sama. Artinya, AS harus meningkatkan impor minyaknya dari 11 mbd menjadi 18,5 mbd atau sekitar 7,5 mbd dalam 20 tahun ke depan. Angka itu sama de-

ngan kebutuhan total Cina dan India.

Salah satu usulan NEPDG adalah meningkatkan kemandirian energi AS. Untuk itu, diusulkan agar AS meningkatkan eksplorasi minyak di kawasan Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), yang kemudian menimbulkan kontroversi karena berhadapan dengan aktivis lingkungan hidup.

Ketika lahan domestik terbatas, proposal lainnya adalah membuka peluang impor minyak dari berbagai kawasan, antara lain wilayah Laut Kaspia, Afrika Barat dan Amerika Latin. Wilayah Laut Kaspia terdiri dari Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan beberapa bagian wilayah dari Iran dan Rusia. Menurut Departemen Energi AS, diperkirakan kawasan itu menyimpan 233 miliar barel minyak.

Posisi Afrika Barat juga cukup penting. Meskipun sampai tahun 2000 hanya wilayah itu hanya menghasilkan 10 persen dari produksi global, akan tetapi diperkirakan akan meningkat menjadi 25 persen pada tahun 2020. Sedangkan beberapa negara Amerika Latin juga merupakan pemasok minyak AS yang sangat strategis. Venezuela, misalnya, merupakan pemasok minyak ketiga terbe-

sar ke AS, setelah Kanada dan Arab Saudi. Sementara itu, Meksiko menempati urutan keempat dan Kolumbia berada di urutan ketujuh.

Invasi AS ke Irak, pada awalnya diperkirakan tidak akan serumit yang harus dihadapi AS hari ini. Artinya, apabila skenario Irak sesuai dengan rencana, seharusnya AS tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi. Namun dengan "kegagalan" di Irak, terdapat cukup besar kemungkinan bahwa intervensi politik AS mungkin akan diarahkan di wilayah-wilayah penting di atas.

Bentuk-bentuk intervensi itu akan sangat beragam, bukan hanya invasi militer. Namun yang pasti, kondisi semacam itu akan meningkatkan potensi konflik domestik, regional atau bahkan internasional dalam memperebutkan sumber energi dunia.

Apabila Cina dan India dimasukkan ke dalam konstelasi politik minyak dunia, maka peta kekuatannya akan menjadi makin kompleks. Artinya, politik minyak dalam beberapa hari ini akan tetap sepanas semburan api di ladang-ladang pengeborannya. ♦

PENULIS ADALAH
DIREKTUR AKADEMIK,
MAGISTER PERDAMAIAN DAN
RESOLUSI KONFLIK, UGM,
YOGYAKARTA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

Bila Harga Minyak Bertahan di Atas 30 Dolar AS

Pemerintahan Baru Bisa Hapus Subsidi BBM

BANDUNG, (PR).-

Jika harga minyak dunia tetap di atas 30 dolar AS per barel, pemerintahan baru akan tergoda untuk menghapuskan subsidi BBM. Sebab dengan harga sebesar itu, subsidi BBM akan mencapai Rp 40 triliun.

"Di masa lalu, ketika harga minyak naik, kita pesta pora. Sekarang kita kelabakan karena menjadi negara pengimpor minyak. Kenyataan ini masih ditutup-tutupi karena Purnomo Yusgiantoro - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia - masih Presiden OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak)," ujar Ketua *Institute for Multi-Disciplinary Research* (IMDR) Dr. Dradjad Wibowo mengungkapkan hal itu dalam seminar "Sketsa Perencanaan Indonesia Pascapemerintahan Baru" di Bandung, Rabu (1/9) pagi. Hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu, pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dan Direktur Kepatuhan PermataBank Elvyn G. Masassya.

Dikatakan, kenaikan harga minyak dunia tersebut menyebabkan pembengkakan defisit anggaran pemerintah. "Seperti

dalam APBN Perubahan karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) naik menjadi Rp 63 triliun," ujarnya.

Naik bertahap

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas, Tubagus Haryono menyatakan pemerintah harus menaikkan harga BBM secara bertahap untuk mengurangi beban subsidi APBN. Jika subsidi BBM terus diberikan, tak lama lagi keuangan Indonesia diyakini akan kolaps.

"Kalau subsidi begini terus, Indonesia bisa kolaps. Jadi pemerintah harus segera menyesuaikan dengan cara menaikkan BBM secara bertahap sesuai mekanisme pasar," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Rabu (1/9).

Penyesuaian tersebut, menurut Tubagus, dilakukan karena semakin tingginya harga minyak internasional akan berpengaruh terhadap subsidi bahan bakar. Menurut Tubagus, usulan BPH Migas tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah, namun belum secara formal.

"Yang pasti, pemerintah perlu meninjau mekanisme subsidi. Ja-

ngan sampai subsidi tidak dinikmati oleh orang yang tidak mampu," tandasnya.

Apalagi, penyesuaian harga BBM diyakini akan semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya di kegiatan hilir migas berupa penyediaan dan pendistribusian BBM dalam negeri.

Lebih jauh Drajad menyatakan, tekanan terbesar terhadap stabilitas makro sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti harga minyak dunia dan gejolak nilai tukar euro-dolar AS. Tekanan lainnya berupa defisit anggaran riil, dan kinerja ekspor. Tantangan inilah yang harus dihadapi pemerintahan baru pascapemilihan presiden 20 Oktober 2004.

Ia menjelaskan, kira-kira 40-48% dinamika inflasi dipengaruhi *pass-through effect* dari nilai tukar rupiah. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat mengikuti tren inflasi. Sementara 70% fluktuasi rupiah-dolar AS terkait faktor eksternal nilai tukar euro-dolar AS.

"Kelemahan fundamental makro terlihat dari data Agustus 2003-Februari 2004. Anehnya, ketika euro menguat drastis terhadap dolar AS, rupiah justru relatif melemah. (A-56/A-78)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Enam Investor Asing Incar Migas di Indonesia Timur

DENPASAR — Enam perusahaan perminyakan asing dari lima negara, mulai mengincar sumber-sumber minyak Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Untuk membuktikan keseriusannya, mereka telah bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan jajaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Mereka juga mengatakan akan kembali lagi dan akan segera mengirimkan tim teknis secepatnya," kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, di Bali, Selasa (31/8)

malam.

Enam perusahaan yang terhimpun dalam Waterous & Co Kanada itu, yakni Orient Petroleum Inc (Pakistan), Woodside (Australia), Oranje-Nassau Group BV (Belanda), Mol Group (Hongaria), Anadarko dan Murphy (Amerika). Mereka masing-masing diwakili pimpinan puncak perusahaannya dan mengadakan pertemuan serta melakukan pembicaraan dengan pihak Departemen ESDM selama dua hari di Hotel Amandari Ubud, Bali.

Kemarin malam, kelompok perusahaan yang punya investasi pasar mencapai 32 miliar dolar AS itu, menyaksikan pertunjukan tari kecak dan mengadakan jamuan makan malam di Hotel Amankila, Candidasa. Menurut

Yusgiantoro, dalam pembicaraan selama dua hari, telah terjadi interaksi yang sangat komunikatif antara kedua belah pihak.

Bahkan mereka juga sudah mendapat penjelasan mengenai berbagai hal bila berinvestasi di Indonesia. "Mereka juga menanyakan masalah keamanan, yang sudah kita jawab dengan kenyataan-kenyataan yang ada; yang akhirnya mereka sendiri berkesimpulan bahwa Indonesia aman untuk berinvestasi."

Dijelaskan Yusgiantoro, beberapa hal menjadi pertimbangan calon investor itu, sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, yakni karena Indonesia negara yang besar dan rakyatnya banyak; sehingga konsumsi minyaknya juga besar. ■ aas

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: 5 TAHUN 2004

Ekonomi Singapura Belum Terpengaruh Harga Minyak

SINGAPURA — Menteri Perdagangan Singapura, Lim Hng Kiang, mengungkapkan, lonjakan harga minyak belum akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Singapura tahun ini. Tahun ini Singapura menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

"Dampak kenaikan harga minyak itu ada kemungkinan baru akan terasa tahun depan," kata Lim kemarin ketika berbicara di depan parlemen.

Menurut Lim, stimulasi yang diberikan kementeriannya dan beberapa institusi internasional seperti Asian Development Bank membuat dampak harga minyak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini bisa diminimalkan.

"Indikator pertumbuhan ekonomi pendahuluan pada Juli menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif," katanya. Meskipun demikian, Lim mengakui, dampak negatif yang paling besar adalah turunnya permintaan dari luar (ekspor).

Departemen Perdagangan memperkirakan, jika harga minyak dunia rata-rata US\$ 45 per barel selama periode Agustus-Desember 2004, pertumbuhan PDB bisa turun 0,4 basis poin. • afp/grace

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Tajuk Rencana

Setelah Widya di Pertamina

Pertamina memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan ExxonMobil untuk pengelolaan ladang minyak dan gas bumi (migas) di Blok Cepu, Jawa Timur. Keputusan yang agak kontroversial itu dinyatakan Direktur Utama Pertamina Widya Purnama dalam rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Ia agak kontroversial karena keputusan itu dibuat ketika kerjasama Pertamina-ExxonMobil masih berlangsung. Kontrak kerjasama dengan ExxonMobil —perusahaan asal Amerika Serikat— masih mengikat hingga 2010.

Keputusan tersebut dibuat Widya Purnama ketika dia belum satu bulan menempati posisi sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sebelumnya, berbagai perundingan yang dilakukan para pendahulunya perihal perpanjangan kontrak tersebut selalu berakhir buntu. Sebelumnya, ketika baru seminggu menduduki jabatan puncak di badan usaha milik negara itu, Widya menegaskan bahwa Pertamina tidak akan membayar klaim yang diajukan Karaha Bodas Company atas pembatalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Garut, Jawa Barat, setelah pemerintah juga melontarkan pernyataan yang sama. Apakah Widya memang sengaja “dipasang” di Pertamina untuk membuat keputusan-keputusan strategis atas persoalan krusial yang dihadapi Pertamina saat ini?

Widya yang pernah menyatakan berambisi menjadikan Pertamina sejajar dengan perusahaan migas Malaysia, Petronas, tidak memiliki background di bidang migas. Beberapa saat sebelum pelantikannya sebagai Dirut Pertamina, Widya—yang kini masih menjabat sebagai Dirut PT In-dosat Tbk.— menyatakan akan membasmi praktek mafia bahan bakar minyak yang terjadi di Pertamina selama ini dan melibatkan banyak pihak. Sikap Widya ini juga didukung Meneg BUMN Laksamana Sukardi. Jika begitu, patut dipertanyakan mengapa baru sekarang pemerintah menempatkan orang seperti Widya untuk memimpin Pertamina? Kenapa para pendahulunya seperti tidak mampu?

Jawaban dari pertanyaan ini tidak mungkin didapat. Yang jelas, setiap keputusan yang dilontarkan Widya selama ini menyangkut kinerja Pertamina selalu didukung pemerintah, baik Kementerian Negara BUMN maupun Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan Blok Cepu misalnya, pemerintah seperti ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro tidak akan mengintervensi keputusan Pertamina yang tidak akan memperpanjang kontrak tersebut. Blok Cepu, kata Purnomo, merupakan wilayah kerja Pertamina sehingga ExxonMobil harus tetap bicara dengan BUMN itu, karena sesuai dengan aturan, intervensi pemerintah di wilayah bisnis akan dikurangi.

ExxonMobil ingin memperpanjang kontraknya karena di lapangan migas tersebut ditemukan lagi cadangan minyak yang signifikan sebesar 600 juta barrel dan 700 miliar sampai 1,25 triliun gas. Beberapa analis memperkirakan, cadangan di blok tersebut jauh lebih besar dari estimasi ExxonMobil. Boleh jadi, karena adanya potensi itulah Pertamina tergiur untuk menggarap sendiri blok ini sehingga tidak ada jalan lain selain menghentikan kontrak kerjasama dengan ExxonMobil. Widya juga sangat optimis Pertamina mampu mengelola blok tersebut pasca kontrak itu dan perusahaan serta negara akan lebih diuntungkan. Pertamina kini baru mengakui bahwa mengelola sendiri jauh lebih menguntungkan, setelah perundingan dengan ExxonMobil sendiri sudah memakan waktu hampir tiga tahun.

Mungkinkah pengelolaan sendiri Blok Cepu akan mendorong nilai Pertamina dan mengangkat citranya yang sedang merosot? Mungkin itu maunya, dan boleh jadi hendak diarahkan agar Pertamina memiliki nilai jual yang tinggi. Ini penting, dalam nafas privatisasi BUMN.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Pertamina Bayar Utang Rp 2,3 Triliun kepada Pemerintah Tahun Ini

JAKARTA — PT Pertamina (persero) sepakat akan membayar utang kepada pemerintah Rp 2,3 triliun tahun ini. Total tunggakan Pertamina mencapai Rp 9,8 triliun.

"Prosesnya sedang berjalan," kata Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution di Jakarta kemarin dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR.

Menurut Darmin, tunggakan Rp 9,8 triliun itu merupakan kewajiban Pertamina kepada pemerintah, yang terdiri dari penerimaan minyak dan gas Rp 9,1 triliun, kewajiban usaha panas bumi Rp 46 miliar, dan laba Pertamina yang merupakan bagian pemerintah Rp 675 miliar. Kewajiban ini merupakan akumulasi tunggakan Pertamina hingga 31 Desember 2003.

Sebaliknya, kewajiban pemerintah terhadap Pertamina yang belum dibayar mencapai Rp 1,5 triliun, yakni berupa keuntungan hulu Pertamina. Tunggakan pemerintah ini, menurut Darmin, akan diselesaikan seluruhnya bersamaan dengan pembayaran utang Pertamina kepada pemerintah.

Darmin menambahkan, penyelesaian tunggakan ini merupakan penyelesaian kewajiban Pertamina di luar penjualan aset. Penjualan aset, yang akan dilakukan pada 2005, akan dipakai untuk menyelesaikan sisa tunggakan yang belum dibayar. "Tetapi, aset yang bukan *core business* Pertamina," katanya.

Menurut dia, jika Pertamina belum mampu menyelesaikan kewajiban membayar utangnya

kepada pemerintah, perusahaan itu terpaksa melakukan penjadwalan utangnya kembali.

Seperti diketahui, utang Pertamina ini seharusnya dibayar kepada pemerintah pada September 2003. Namun, dalam rapat umum pemegang saham Pertamina pada Januari 2004, perusahaan negara penghasil minyak dan gas itu mengajukan opsi restrukturisasi utang jangka panjang dan pembayaran dengan cara penyerahan modal pemerintah ke Pertamina. Namun, usulan ini ditolak pemerintah karena akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, mengungkapkan, setoran laba badan usaha milik negara ke pe-

merintah tahun depan merosot Rp 2,1 triliun menjadi Rp 9,4 triliun dibandingkan tahun ini yang ditargetkan Rp 11,5 triliun. Penurunan ini antara lain karena penjualan beberapa perusahaan milik negara yang sebelumnya potensial penyumbang laba.

Berkaitan dengan Pertamina, perubahan status Pertamina dari perusahaan negara menjadi persero pada September 2003, juga menjadi penyebab berkurangnya setoran laba BUMN. Perubahan status Pertamina ini dimasukkan dalam APBN Perubahan 2004. Akibatnya, realisasi setoran laba Pertamina tahun ini diperkirakan turun menjadi Rp 7,8 triliun dari yang ditargetkan sebelumnya. Begitu pula realisasi tahun depan diperkirakan akan turun. ● bagja hidayat-tnr

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

Harga BBM Harus Dinaikkan agar Masyarakat Pakai Gas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak secara bertahap agar pemakaian energi alternatif, terutama gas, di dalam negeri bisa meningkat. Selama harga BBM masih di bawah harga internasional karena disubsidi pemerintah, masyarakat lebih suka memakai BBM.

Demikian diutarakan Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (1/9). Keuntungan jika harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri disesuaikan dengan harga internasional, antara lain menciptakan konservasi energi.

Tubagus juga mengatakan, Indonesia akan semakin menarik bagi investor dalam sektor kegiatan hilir migas, terutama dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri.

Dia menambahkan, pemerintah memang perlu menaikkan harga BBM secara bertahap sehingga bisa mengurangi beban subsidi pada APBN. Akan tetapi, dia mengingatkan agar tetap memperhatikan kemampuan golongan masyarakat tertentu dengan menyediakan subsidi secara langsung.

Menurut Tubagus, negara-negara di ASEAN, seperti Vietnam dan Filipina, telah menerapkan harga internasional terhadap

harga BBM dalam negerinya. Hal ini akan membantu pemerintah masing-masing negara dalam menghadapi subsidi bahan bakar.

Tugas BPH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, BPH berfungsi meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Hingga saat ini, pemakaian gas bumi di dalam negeri masih sangat rendah, padahal cadangan total gas bumi Indonesia kini mencapai 176 triliun kaki kubik (TCF).

Pemakaian gas bumi terkendala jarak antara sumber gas bumi dan pasarnya. Sebagian besar cadangan gas bumi berada di luar Pulau Jawa, tetapi sebagian besar konsumen berada di Pulau Jawa.

Kendala lain, sarana dan infrastruktur pengangkutan gas masih kurang. Selain itu juga harga BBM di dalam negeri yang lebih murah dibandingkan dengan harga gas bumi.

Utang piutang Pertamina

Secara terpisah, menjawab

CADANGAN GAS BUMI INDONESIA (triliun kaki kubik) STATUS 1 JANUARI 2002

NAD	9,66
Sumatera Utara	1,05
Sumatera bagian Tengah	9,53
Sumatera bagian Barat	21,23
Natuna	54,79
Kalimantan Timur	48,69
Sulawesi Selatan	0,58
Jawa Barat	7,19
Jawa Timur	4,32
Irian Jaya	19,55

Terbukti : 90,30 triliun kaki kubik
Potensial: 86,29 triliun kaki kubik
Total : 176,59 triliun kaki kubik

Sumber: Ditjen Migas

pertanyaan anggota Panitia Anggaran DPR perihal hubungan utang piutang antara pemerintah dan Pertamina, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, hubungan utang piutang antara pemerintah dan Pertamina saat ini sudah mulai diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun Pertamina sendiri.

Menurut Darmin, sampai dengan akhir tahun 2003 lalu, tunggakan utang Pertamina kepada pemerintah tercatat sebesar Rp 9,857 triliun. Utang tersebut berasal dari penerimaan migas sebesar Rp 9,136 triliun,

kewajiban usaha Pertamina sebesar Rp 46 miliar, dan bagian dari laba Pertamina kepada pemerintah sebesar Rp 675 miliar.

"Dari kewajiban sebesar Rp 9,857 triliun itu, Pertamina akan menyelesaikan kewajiban utangnya dengan membayar kepada pemerintah sebesar Rp 2,3 triliun," katanya.

Sebaliknya, ujar Darmin, kewajiban pemerintah kepada Pertamina mencapai sebesar 168 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun. Kewajiban pemerintah kepada Pertamina itu merupakan *fee* dari usaha hulu Pertamina yang harus dibayar pemerintah. "Saat ini jumlah utang pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun, dan tengah diselesaikan bersama Pertamina untuk memperbaiki keuangan Pertamina," katanya.

Ditanya pers seusai rapat, apakah adil jika pemerintah akan membayar seluruh utangnya kepada Pertamina sebesar Rp 1,5 triliun, sedangkan Pertamina hanya akan membayar Rp 2,3 triliun dari Rp 9,857 triliun kewajibannya, Darmin mengatakan bahwa Pertamina juga akan membayar sisa utangnya kepada pemerintah melalui hasil penjualan aset yang dimiliki Pertamina. "Tetapi, tentu saja aset yang akan dijual itu bukan aset inti milik Pertamina," lanjutnya.

(BOY/HAR)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

■ Pasokan BBM

BPH Migas Sarankan Pemerintah Segera Naikkan Harga BBM secara Bertahap

Jakarta, NERACA

Pemerintah dinilai harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap untuk mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Paslanya, jika subsidi BBM terus diberikan, maka kondisi keuangan negara diyakini makin parah.

"Jika subsidi begini terus, Indonesia bisa kolaps. Jadi pemerintah harus segera menyesuaikan dengan cara menaikkan BBM secara bertahap sesuai mekanisme pasar," kata Kepala Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas, Tubagus Haryono, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, kemarin.

Penyesuaian itu menurut Tubagus harus segera dilakukan karena semakin tingginya harga minyak internasional akan berpengaruh terhadap subsidi BBM. "Usulan BPH Migas tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah, namun belum secara formal. Yang pasti, pemerintah perlu meninjau mekanisme subsidi. Jangan sampai subsidi tidak dinikmati oleh

orang yang tidak mampu," ucapnya.

Tubagus menambahkan, negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina telah menerapkan harga internasional terhadap harga BBM dalam negerinya. Diharapkan, Indonesia dapat segera mengikuti jejak kedua negara tersebut.

"Apalagi, penyesuaian harga BBM diyakini akan semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya di kegiatan hilir migas berupa penyediaan dan pendistribusian BBM dalam negeri," katanya.

Sementara itu PT (Persero) Pertamina untuk periode Oktober 2004 ini tetap tidak akan menaikkan harga jual eceran BBM seperti bensin premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar, serta bahan bakar khusus (BBK) yaitu Pertamina untuk sektor transportasi di dalam negeri pada periode bulan September tidak mengalami kenaikan.

"Harga bensin Premium tetap Rp 1.810 per liter, minyak tanah Rp 1.800, minyak solar dan minyak

diesel Rp 1.650 dan minyak bakar bertahap Rp 1.560 per liter," kata Kepala Divisi Hupmas Pertamina (persero) Hanung Budya, kemarin.

Selanjutnya, untuk harga Pertamina Plus, juga masih tetap seperti sebelumnya yaitu masing-masing Rp 2.450/liter dan Rp 2.750/liter. Sedangkan, harga minyak tanah untuk rumah tangga juga ditetapkan tidak berubah seperti sebelumnya sebesar Rp 700/liter.

Sementara itu, harga jual avtur dan avgas untuk penerbangan pada periode September ini mengalami kenaikan. Harga avtur untuk domestik naik menjadi Rp 3.542 per liter dari Rp 3.179 per liter dan Avgas naik menjadi Rp 6.391 per liter dari Rp 6.389 per liter (harga Agustus).

Hanung menjelaskan, hasil perhitungan harga BBM mengacu pada trend harga MOPS, harga rata-rata crude dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Trend harga MOPS BBM (periode 16 Juli - 15 Agustus 2004) yang digunakan

sebagai acuan penetapan harga patokan untuk September 2004, mengalami beberapa perubahan jika dibandingkan dengan trend periode sebelumnya.

MOPS untuk Gasoline (Premium) mengalami kenaikan sebesar 14,8%, Kerosene (Minyak Tanah) naik 11,4%, HSD (Minyak Solar) naik 13,6%, MDF (Minyak Diesel) naik 14,8% sedangkan MFO (Minyak Bakar) naik 3,7%. Harga rata-rata Crude pada periode tersebut US\$ 40,47 per Bbl atau mengalami kenaikan sebesar 9,8% dari periode sebelumnya. Sementara nilai tukar rupiah yang diberlakukan sebesar Rp. 9.159,05/US\$ (Kurs Jual Bank Indonesia periode 16 Juli - 13 Agustus 2004).

Meski demikian kata dia, sesuai dengan SK Direktur Utama Pertamina, harga eceran BBM untuk sektor transportasi dan harga patokan untuk industri September 2004 tidak mengalami perubahan. Sedang, untuk harga bunker internasional minyak solar naik 13,6%, minyak diesel mengalami kenaikan 12,75%. (22)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Cegah Membengkaknya Subsidi Harga BBM Naik Bertahap

JAKARTA (Media): Pemerintah diminta segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap, untuk mengurangi beban subsidi APBN yang membengkak dari Rp14,5 triliun menjadi Rp63 triliun. Pasalnya, jika subsidi BBM terus diberikan, tak lama lagi keuangan negara akan kolaps.

"Kalau subsidi begini terus, Indonesia bisa kolaps. Jadi pemerintah harus segera menyesuaikan dengan cara menaikkan harga BBM secara bertahap, sesuai mekanisme pasar," kata Kepala Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, kemarin.

Penyesuaian harga tersebut, menurut Tubagus, dilakukan karena semakin tingginya harga minyak internasional akan berpengaruh terhadap subsidi BBM dan menyebabkan defisit anggaran. Sementara konsumsi BBM nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. "Kondisi tersebut terjadi karena 80% komponen harga BBM berasal dari harga minyak mentah. Sedangkan saat ini harga minyak sedang tinggi-tingginya," jelas Tubagus.

Menurut mantan anggota Komisi VIII DPR itu, usulan BPH Migas tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah secara informal. Reaksi awal tampaknya pemerintah mulai mempertimbangkan langkah tersebut. Tetapi, belakangan dengan pertimbangan politis berkaitan dengan Pemilu, membuat pemerintah keberatan untuk menaikkan harga jual BBM domestik.

Rata-Rata Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional per Hari

<input type="radio"/> Solar	72.000 kl
<input type="radio"/> Premium	44.000 kl
<input type="radio"/> M. tanah (kerosene)	32.000 kl
<input type="radio"/> Jenis lainnya (avtur dll)	27.000 kl

Total +/- 175.000 kiloliter

Sumber: PT Pertamina (pesero)

"Pemerintah juga perlu meninjau mekanisme subsidi. Jangan sampai subsidi tidak dinikmati oleh orang yang tidak mampu. Sebaiknya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak atau dialokasikan untuk pendidikan gratis," tukasnya.

Di sisi lain, kata dia, merujuk langkah yang dilakukan negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina, yang telah menerapkan harga internasional terhadap harga BBM dalam negerinya, diharapkan Indonesia dapat segera menerapkan kebijakan yang sama.

Apalagi, penyesuaian harga BBM diyakini akan semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya di kegiatan hilir migas, berupa penyediaan dan pendistribusian BBM dalam negeri.

Menyikapi kondisi tersebut, wakil ketua Komisi VIII DPR Anthonius Rahael mempertanyakan, kebijakan subsidi BBM dalam tahun anggaran 2004 yang sangat besar.

Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan awal 2003 hanya memberikan subsidi bagi BBM minyak tanah untuk rumah tangga saja. Tetapi pada kenyataannya, jenis BBM solar dan premium juga mendapatkan subsidi.

Hal senada juga diutarakan Didi Supriyanto dan Zulkifli Halim yang berpendapat pemerintah tidak konsisten pada kebijakan yang dibuatnya. Sementara untuk jenis BBM lainnya seperti Pertamina, Avtur dan Avgas sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. (Wis/E-6)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- KANTOR BERITA PAB

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31)

HALAMAN: 7

TAHUN 2004

DPR MAKLUMI MEMBENGKAKNYA SUBSIDI MINYAK

Jakarta, 31 Agustus (PAB)

Panitia Kerja Anggaran DPR memaklumi membengkaknya subsidi minyak menjadi Rp 63 triliun dari asumsi Rp 14,5 triliun akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya asumsi harga minyak dipatok 22 dolar AS per barel realisasinya melambung menjadi 32,67 dolar AS per barel.

DPR juga memuji pemerintah dalam mencapai asumsi-asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 selama semester I. Hal tersebut terungkap dalam laporan yang disampaikan Menteri Keuangan Boerdiono pada rapat pleno dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta kemarin.

Salah satu Panitia Anggaran DPR, Munawar, menyatakan DPR menilai meskipun realisasi inflasi pada semester I sudah melampaui asumsi inflasi tahunan, tetapi itu bukan masalah utama.

Bahkan DPR maklum karena nilai tukar rupiah melampaui asumsi APBN. Kondisi itu, ujarnya, masih terkendali yang diperlihatkan dengan lebih rendahnya realisasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 8,5% menjadi 7,49%.

Selain itu, DPR juga memuji program-program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Misalnya, program ekstensifikasi pajak dan administrasi pajak telah mendorong penerimaan negara dari pajak meningkat jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Dari asumsi penerimaan pajak 2004 sebesar Rp 272,2 triliun telah terkumpul penerimaan selama enam bulan terakhir Rp 118,9 triliun.

*)Belum Sepakat

Munawar mengatakan, dalam sisi pengeluaran belanja pegawai yang mencapai Rp 30,8 triliun telah habis lebih dari separuh anggaran. Ini disebabkan adanya pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan pada Juni lalu sebesar Rp 7 triliun. Akibatnya, kata Munawar, realisasi belanja pegawai lebih tinggi 29,2% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dalam laporan itu, DPR dan pemerintah belum menyepakati besaran defisit selama semester I. Hal tersebut disebabkan masih adanya perdebatan mengenai pencairan dan penggunaan dana talangan sebesar Rp 500 miliar untuk operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Panitia DPR dengan keras mempersoalkan mekanisme pencairan dana tambahan itu karena tidak atas persetujuan Panitia Anggaran DPR. (PAB/R-07)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 4	TAHUN 2004

BBM Bersubsidi Dijual ke Industri

KENDARI - Sejumlah industri di Sulawesi Tenggara (Sultra) membeli bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah kesulitan untuk memperoleh BBM. "Penyimpangan penyaluran minyak tanah bersubsidi ini sudah berlangsung lama. Namun oknum pelakunya, tidak pernah tersentuh hukum," kata Kahumas Pertamina Unit Pemasaran VII, Winarto kepada wartawan di Kendari, Selasa (31/8).

Menurut Winarno, Pertamina menyiapkan minyak bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat lebih dari kebutuhan riil, yakni sebanyak 51 kilo liter (KL) per hari atau setiap jiwa mendapat jatah 3,7 liter per hari. Winarno menambahkan, dengan jumlah penduduk Kota Kendari yang hanya 257.069 jiwa, alokasi 51 KL tersebut masih terdapat cadangan sebanyak 14 KL. "Jadi, kalau tidak dijual ke industri-industri, tidak Kota Kendari tidak mungkin terjadi kelangkaan BBM," katanya.

Menurut Winarto, sejumlah industri membeli BBM bersubsidi di tingkat pengecer itu karena harganya relatif murah, yakni Rp 1000 per liter. Sedangkan harga BBM untuk kebutuhan industri yang seharusnya di beli di Pertamina, sebesar Rp 1.500 per liter (gus)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

Oil prices rebound ahead of U.S. inventories data

Perrine Faye
Agence France-Presse/London

Oil prices rebounded on Wednesday after plunging by over 10 percent in under two weeks on fading supply fears, as traders turned their attention to weekly estimates of U.S. oil inventories.

The price of London's benchmark Brent North Sea crude oil for delivery in October climbed by 46 cents to US\$40.07 a barrel in early deals. The contract slumped by over a dollar a day earlier.

In New York light sweet crude for October delivery increased by 42 U.S. cents to \$42.54 per barrel in pre-opening electronic trading — down by about 14 percent from an all-time high of \$49.40 reached on Aug. 20.

Many speculators have exited the market in response to an easing of worries about supply threats in several major pro-

ducers, particularly in Iraq after rebel cleric Moqtada Sadr called for a nationwide ceasefire, analysts said.

Traders were awaiting weekly estimates of U.S. oil inventories from the U.S. Department of Energy and the private American Petroleum Institute due later on Wednesday.

"Oil prices are going up a little looking ahead to the inventory data," said Commerzbank analyst David Thomas.

He predicted an increase in U.S. commercial crude oil stocks of 1.2 million barrels "based on a surge in imports."

Gasoline inventories were set to fall by one million barrels while distillates — mostly diesel and heating oil — were seen rising by 800,000 barrels, Thomas added.

Gasoline stocks were expected to be drained down ahead of Monday's U.S. Labor Day public holiday,

seen as the end of the peak summer consumption period.

Distillates stocks were expected to traditionally show builds ahead of the winter season.

"Seasonally speaking a draw in gasoline is expected, and a build in distillate stocks, which are already low," said a London-based trader.

Any draws in distillates would prompt fresh buying, he added.

Informa Global Markets analyst Peter Luxton said: "The consensus is for a two million barrel build in crude stocks, and a decline in gasoline."

He added this is "understandable ahead of next weekend's Labor Day public holiday in the U.S.," where many will have road trips planned.

Luxton added that if stock figures come in as he expected, then prices in New York might trade under \$40 a barrel.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Impor Minyak Indonesia Tertinggi dalam Sejarah

JAKARTA — Kepala Direktorat Statistik Perdagangan dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan menyatakan, nilai impor minyak yang dilakukan pemerintah merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut dia, impor minyak mentah Indonesia pada selama Januari-Juli 2004 tercatat US\$ 1168,3 juta atau naik 53,53 persen dari periode yang sama 2003. Sementara itu, impor hasil minyak meningkat 26,37 persen atau menjadi sebesar US\$ 552,1 juta.

Rusman menjelaskan, dengan fakta seperti itu maka Indonesia sudah benar-benar menjadi negara pengimpor minyak (*net oil importer*). "Karena saat ini nilai ekspor Indonesia hanya setengah dari nilai impor minyak," katanya.

Rusman menambahkan, jika nilai ekspor tersebut ditambah dengan nilai produksi gas alam, Indonesia memang masih terhitung surplus. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk tidak mengekspor gas alam. Itu sebabnya, kata dia, kenaikan harga minyak dunia tidak menguntungkan buat perekonomian Indonesia. ● rina

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2004

Kompensasi Migas Siak dari Blok CPP Rp20 Miliar

PEKANBARU (Media): Pemerintah Kabupaten (Pekab) Siak memperoleh dana kompensasi minyak dan gas (migas) sebesar Rp20 miliar per tahun dari eksploitasi ladang minyak Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP). Produksi Blok CPP saat ini berkisar 31.000 barel per hari (bph).

Manajer Senior Operasional Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Slamet Wibisono kepada wartawan di Zamrud, Siak, Selasa (31/8), mengatakan kenaikan harga minyak dua tahun terakhir otomatis berdampak positif bagi pendapatan BOB PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Namun, pihaknya belum dapat menghitung besar kenaikan pendapatan dari eksploitasi tersebut, karena baru dapat dilihat pada akhir tahun.

"Insya Allah di tahun-tahun mendatang kontribusi tersebut akan diperbesar lagi seiring masih terjadinya peningkatan produksi serta membaiknya harga minyak dunia," kata Slamet didampingi, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Minyak dan Gas (BP Migas) Wilayah Sumatra Bagian Utara Luluk Haridjanto.

Slamet menyebutkan, BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu merupakan perusahaan yang dipercaya oleh Pemkab Siak untuk mengeksplorasi ladang minyak Blok CPP setelah diserahkan dari PT Caltex Pacific Indonesia dua tahun lalu.

Slamet menyatakan, produksi ladang minyak Blok CPP masih pada kisaran 31.000 barel per hari. Tingkat produksi tersebut merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan oleh konsorsium badan usaha milik daerah Kabupaten Siak PT Bumi Siak Pusako dengan Pertamina Hulu dalam menahan penurunan alami tingkat produksi minyak bumi yang mencapai 28% per tahun.

Slamet menyebutkan, total produksi ladang minyak Blok CPP hingga Agustus 2004 sebesar 31.000 barel per hari (bph). Jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah produksi dua tahun lalu yang mampu mencapai 35.000 bph.

"Saat penyerahan Blok CPP dari PT Caltex Pacific Indonesia kepada BOB pada 9 Agustus 2002, produksi memang mencapai 34.000 hingga 35.000 barel per hari. Akan tetapi, memasuki dua tahun pertama setelah pengalih-

an, produksinya hanya 31.000 barel per hari," kata Slamet.

Menurut Slamet, meskipun jumlah produksinya menurun dibandingkan dua tahun lalu, tingkat produksi itu masih berada di atas batas penurunan alami yang mencapai 28% per tahun. Sementara pada 2004 tingkat produksinya hanya turun sekitar 5%.

"Meskipun tingkat produksinya menurun, kami masih mampu menahan laju penurunan alami dengan penurunan tingkat produksi sebesar 5% saja. Pada saat masih dikelola oleh Caltex, penurunan alaminya mencapai 28% per tahun," katanya.

Untuk meningkatkan jumlah produksi hingga 35.000 bph atau dikembalikan pada tingkat produksi awal, ujarnya, pihaknya telah merancang strategi, yaitu dengan mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru, di antaranya ladang minyak di kawasan Mempura, Kabupaten Siak.

"Selain itu, kami akan melakukan pengembangan pada sumur-sumur minyak yang sudah ada namun mengalami penurunan kapasitas kandungan minyaknya karena terlalu tua," kata Slamet.

(TH/N-2)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST <u>SEPT</u> OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4 TAHUN 2004	

Produksi Minyak CPP Block Stabil

PEKANBARU - Produksi minyak Coastal Plains Pekanbaru (CPP) Block sejak dikelola perusahaan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak cenderung stabil, rata-rata 31.000 barel per hari. Sebaliknya, saat masih dikelola oleh PT Caltex Pacific Indonesia, produksi dari ladang minyak itu cenderung mengalami penurunan 5 persen per tahun.

"Penurunan itu sebenarnya alami. Karena kadar air dalam setiap produksi minyak sangat signifikan. Dan tidak satu alat pun yang bisa menurunkan kadar air dalam minyak tersebut," kata Manager Senior Operasional Badan Operasi Bersama (BOB) PT Siak Bumi Pusako (BSP) dan Pertamina Hulu, Slamet Wibisono, di Pekanbaru, Senin (31/8).

Slamet menyebutkan, BOB PT BSP-Pertamina Hulu merupakan perusahaan yang kini dipercaya Pemkab Siak untuk mengeksploitasi ladang minyak CPP Block setelah diserahkan PT Caltex Pacific Indonesia, dua tahun lalu. Ia menambahkan, pihaknya berupa untuk mempertahankan produksi CPP Block yang rata-rata perhari dapat menghasilkan 31.000 barrel. Namun, untuk mempertahankan produksi rata-rata tersebut sangat sulit, mengingat secara alami ladang minyak yang ada cenderung mengalami penurunan produksi. (den)

23

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
 ② 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Pasokan Minyak Tanah di Jakarta Masih Lancar

Pasokan minyak tanah di beberapa wilayah di Jakarta sampai saat ini masih lancar, meski beberapa daerah lain di Indonesia mengalami masalah kelangkaan minyak. "Pengiriman minyak tanah ke warung saya masih lancar, 'enggak' pernah 'enggak' dikirim," kata Suryanto, pemilik agen minyak tanah di Jalan Kertamukti, Ciputat, Tangerang, Selasa.

Beberapa pekan terakhir ketersediaan minyak tanah di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jaya Pura, Banjarmasin dan sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami kelangkaan karena kurangnya pasokan minyak tanah di daerah tersebut.

Sementara itu, di Jakarta sejumlah pedagang minyak tanah justru mengemukakan tidak mengalami kesulitan untuk memasok minyak tanah.

"Pasokannya tetap, tidak mengalami kelangkaan," kata Suryanto.

Hal yang sama dikemuka-

kan pula oleh Eko, seorang pedagang minyak tanah yang berdagang di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Sekarang pengawasan dari Pertamina ketat, agen saja yang ketahuan melanggar atau memasok tidak sesuai jumlah, 'delivery order' (DO)-nya langsung dicabut, sehingga mereka lebih berhati-hati dan tidak mau melanggar ketentuan meski mungkin ada yang coba-coba jual minyak tanah ke pabrik, tapi kalau ketahuan risikonya berat," jelas Eko.

Harga per liter minyak tanah pada tingkat pengecer di beberapa wilayah, seperti Pulomas (Jakarta Timur), Tanah Abang (Jakarta Pusat) dan Ciputat (Tangerang), dan Penjarangan (Jakarta Utara) relatif stabil berkisar antara Rp1.100 sampai Rp1.300 per liter.

Sedangkan, harga minyak tanah per liter di pangkalan berkisar antara Rp885 sampai Rp900, dan harga di agen minyak tanah sekitar Rp950 per liter. "Kami menjual ke peda-

gang keliling yang mengambil minyak tanah di sini seharga Rp885, sesuai dengan harga patokan yang ditetapkan oleh Pertamina, setidaknya ada 10 orang pedagang keliling yang ke tempat saya," kata Mulya, seorang pemilik pangkalan minyak tanah di dekat Stasiun Tanah Abang.

Di Wilayah DKI Jakarta sendiri harga eceran tertinggi (HET) tahun 2004 ditetapkan senilai Rp885 per liter, dengan rincian harga dari depo Rp700 per liter, biaya transportasi Rp60 per liter (jarak maksimal 40 km), margin agen Rp55 per liter serta margin pangkalan Rp 70 per liter.

Keluhan hanya disampaikan oleh sejumlah pedagang minyak tanah mengenai penurunan omset dan penarikan biaya tambahan yang dilakukan oleh pengemudi mobil tangki minyak tanah.

"Saya hanya menjual satu ember minyak tanah, sekitar 20 liter, itu pun baru habis setelah beberapa hari. Sekarang makin banyak yang jual-

an minyak tanah eceran jadi persaingannya ketat," kata Siti (50) pemilik warung di sekitar Jati Bunder, Tanah Abang, Selasa.

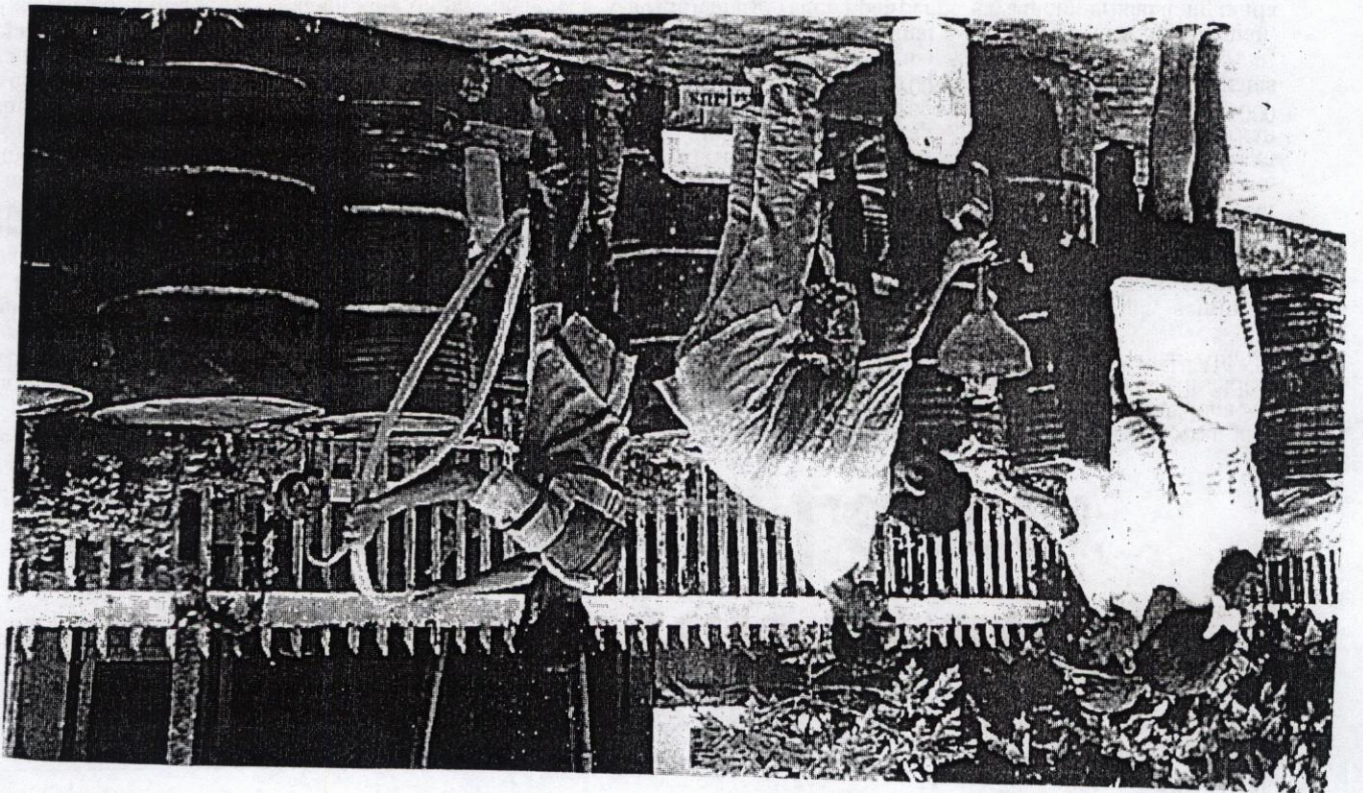
Di lain pihak, sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah mengeluhkan pungutan uang tanda terima kasih atau "uang cor" yang dilakukan oleh beberapa pengemudi mobil tangki minyak, sehingga mereka harus mengeluarkan uang lebih dari Rp4.075.000 per mobil yang berkapasitas 5.000 liter.

"Setiap ada pengiriman, saya memberikan uang tanda terima kasih Rp60.000 kepada pengemudi mobil," kata Sambas, salah seorang pemilik pangkalan minyak tanah di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Menurut dia, tidak seharusnya agen maupun pengemudi memungut uang tambahan karena pembayaran Rp4.075.000 per 5.000 liter itu sudah termasuk biaya transportasi.

(Antara)

h8



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Enam Investor Tertarik Eksplorasi Migas

KARANGASEM (Media): Enam perusahaan minyak dan gas bumi (migas) dari lima negara asing mulai menjajaki kemungkinan, menanamkan investasi di bidang eksplorasi di Indonesia.

Penjajakan tersebut dilakukan pada sebuah seminar di Ubud dan Karangasem, Bali, yang berlangsung sejak Senin (29/8) sampai Selasa (1/9) malam dan dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Kedatangan para calon investor tersebut, yang dikoordinir Managing Director International Waterrous & Co, Douglas R. De Filippi ini, merupakan yang pertama kalinya ke Indonesia atas undangan dan tawaran kerja sama menteri dalam eksplorasi migas di Tanah Air.

Keenam perusahaan tersebut memiliki omzet sekitar US\$32 miliar itu, adalah Orient Petroleum (Pakistan), Anadarko, Murphy (Amerika Serikat), Woodside (Australia), Molgroup (Hongaria), Oranje Nasan (Belanda).

Djela-sela acara tanya jawab dengan para wartawan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan dalam waktu dekat para calon investor tersebut akan datang kembali ke Indonesia untuk pembicaraan lebih lanjut dengan mengirimkan timnya.

Minat kelompok perusahaan migas yang cukup bonafide di negaranya itu, dinilai Purnomo sebagai peluang sangat bagus bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama bidang pengembangan migas.

Berdasarkan catatan Departemen ESDM, Indonesia memiliki potensi minyak bumi 90 miliar barel.

Sementara cadangan yang sudah nyata dimiliki Indonesia sebanyak 10 miliar barel. Angka tersebut bila dikonversi dengan kapasitas produksi dalam negeri yang mencapai 1,1 juta barel per hari, maka diperkirakan bisa bertahan 18 sampai 20 tahun.

Menjawab pertanyaan soal besaran estimasi kenaikan investasi dengan kedatangan calon investor tersebut, Menteri ESDM berharap upaya tersebut bisa berdampak positif.

Dalam perkembangannya, investasi di sektor migas tahun 1997 mencapai US\$4,3 miliar. Sedangkan pada tahun lalu naik menjadi US\$5,3 miliar, dan tahun ini optimistis tercapai target US\$7,4 miliar karena akan ada penandatanganan 27 kontrak KPS (*contractor production sharing*).

Pencapaian tersebut, belum termasuk perhitungan, bila para calon investor itu positif menanamkan investasi. (RS/E-6)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Pertamina Diminta Tunda Serahkan Tanker

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar Menteri Negara Pemberdayaan BUMN Laksamana Sukardi mempertimbangkan menunda penyerahan kapal tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*) ke Frontline Ltd.

Menurut Ketua KPPU, Sutrisno Iwanton, pihaknya meminta penundaan karena majelis KPPU sedang melaksanakan pemeriksaan awal atas kasus penjualan kapal tanker. Menurut dia, permintaan itu telah disampaikan dalam surat yang dikirimkan Jumat lalu. "Kami ingin agar proses hukum ini dipertimbangkan karena berbagai konsekuensi hukum bisa saja terjadi," katanya kepada *Koran Tempo* kemarin.

Iwanton menjelaskan, surat itu dikirim atas usulan tim pemeriksaan awal. Alasannya, Pertamina harus menyerahkan satu lagi kapal tanker ke Frontline dalam bulan ini. Kendati begitu, dia mengaku, surat kepada Menteri tidak secara gamblang meminta agar serah-terima itu ditunda. "Kami tidak menyatakannya secara eksplisit," katanya.

Seperti yang telah diberitakan, KPPU melaksanakan pemeriksaan awal terhadap penjualan kapal tanker raksasa sejak awal bulan lalu. Sesuai dengan undang-undang, jangka waktu pemeriksaan

awal sangat terbatas, yakni hanya 30 hari. Berbagai pihak untuk dimintai keterangan, yaitu Direksi Pertamina—era Ariffi Nawawi dan Widy Purnama, komisaris Pertamina—Goldman Sachs, dan pihak pelapor.

Salah satu pasal yang disorot untuk kasus ini adalah pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Ketua Tim Pemeriksa, Pande Radja Silalahi, kesimpulan pemeriksaan awal akan menentukan keputusan komisi untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahap berikutnya. Jika pemeriksaan lanjutan kemudian membuktikan adanya pelanggaran terhadap undang-undang, sanksinya bisa berupa pembatalan perjanjian—termasuk hasil tender—atau denda, yang berkisar antara Rp 1-25 miliar.

Pande memastikan, kesimpulan tim pemeriksa akan segera dilaporkan pada komisi pada Kamis (9/9) mendatang. Dia menjanjikan, paling lambat, pembacaan keputusan akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Pekan ini, pihaknya masih akan memanggil jajaran lengkap komisaris Pertamina serta pihak pelapor. "Masih ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi," katanya. ● dara meutia uning

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
 ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2004

Avtur Naik, Garuda Kurangi Tiket Promosi

Jakarta, Sinar Harapan

Perusahaan penerbangan sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pesawat menyusul naiknya harga bahan bakar pesawat avtur oleh Pertamina. Harga avtur domestik naik dari Rp 3.178 per liter bulan Agustus menjadi Rp 3.542 per liter pada September 2004.

Setiap kenaikan bahan bakar avtur memiliki dampak yang cukup besar bagi operasional perusahaan penerbangan. Namun demikian, kenaikan tarif pesawat masih *wait and see* mengingat persaingan di dalam negeri masih sangat ketat. Demikian keterangan yang

diperoleh SH dari Direktur Niaga PT (Persero) Garuda Indonesia, Bachrul Hakim dan Direktur Utama Star Air, Ale Sugiarto yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (19) pagi.

Bachrul mengatakan, Garuda Indonesia akan mengurangi tiket dengan harga promosi maupun penjualan tiket subkelas. Kenaikan harga avtur dipastikan akan berdampak besar terhadap operasional pesawat.

Menurut Bachrul, untuk penerbangan domestik masih sulit menaikkan tarif sekalipun harga avtur sudah dinaikkan. Persoalannya, masih banyak

airlines yang tetap menawarkan dengan tarif rendah.

Hal senada juga dikemukakan oleh Dirut Star Air, Ale Sugiarto. Menurut Ale, ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam industri penerbangan yakni bahan bakar dan dolar. Kebetulan, kedua komponen itu sedang bergejolak, sehingga biaya operasional pesawat udara menjadi naik cukup besar.

Star Air sendiri, kata Ale, tidak akan menaikkan tarif. Pihaknya lebih memilih mengurangi tiket promosi dan menghapus tiket subkelas yang dipasarkan selama ini. (kbn)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : {}	
TAHUN 2004	

BBM Bersubsidi Dijual ke Industri

Warga Sultra Kesulitan Minyak Tanah

Kendari, Sinar Harapan

Sejumlah industri di Sulawesi Tenggara (Sultra) membeli bahan bakar minyak (BBM), khususnya minyak tanah di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah kesulitan mendapatkan minyak tanah.

"Penyimpangan penyaluran minyak tanah bersubsidi ini sudah berlangsung lama. Namun oknum pelakunya, tidak pernah tersentuh hukum," kata Kahumas Pertamina Unit Pemasaran VII, Winarto kepada wartawan di Kendari, Selasa (31/8) siang.

Menurut Winarno, Pertamina menyiapkan minyak bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat lebih dari kebutuhan riil, yakni sebanyak 51 kilo liter (KL) per hari atau setiap jiwa mendapat jatah 3,7 liter per hari.

Bahkan kata Winarno, dengan jumlah penduduk Kota Kendari yang hanya 257.069 jiwa, alokasi 51 KL tersebut masih terdapat cadangan sebanyak 14 KL. "Jadi, kalau tidak dijual ke industri-industri, Kota Kendari tidak mungkin terjadi kelangkaan BBM," katanya.

Dijelaskannya, Pertamina menyiapkan minyak tanah lebih dari kebutuhan riil tersebut untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama pada hari-hari besar keagamaan dan sebagainya. Namun karena sejumlah industri sering menadah BBM bersubsidi, menyebabkan masyarakat sering kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah.

"Industri yang sering menadah bahan bakar bersubsidi ini adalah industri yang bergerak di sektor industri rotan dan kontraktor pengaspalan jalan. Mereka membutuhkan minyak tanah cukup besar untuk memanaskan rotan (agar mudah dilengkung) atau mencairkan aspal saat melakukan pengaspalan jalan," katanya.

Menurut Winarto, sejumlah industri membeli minyak tanah bersubsidi di tingkat pengecer itu karena harganya relatif murah, yakni Rp 1.000 per liter. Sedangkan harga BBM untuk kebutuhan industri yang seharusnya di beli di Pertamina sebesar Rp 1.500 per liter.

"Perbedaan harga yang cukup signifikan ini, mendorong pemilik industri membeli minyak di tingkat pengecer. Karena memang, yang namanya industri selalu mencari keuntungan besar," katanya.

Ditertibkan

Melihat kelangkaan bahan bakar bersubsidi yang sering dikeluhkan warga tersebut, Wali Kota Kendari, H Masyhur Masie Abunawas mulai melakukan penertiban, dengan membentuk Tim Pengawas Penyaluran BBM. Untuk tugas tersebut, Wali Kota menunjuk Asisten II Pemkot Kendari, Drs

Yusuf Hamilu sebagai Ketua Tim.

Kepada Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pemkot, Kejaksaan, Polda Sultra dan Pertamina itu, Wali Kota Masyhur Masie meminta agar melakukan tindakan tegas terhadap industri maupun agen yang ketahuan membeli atau menumpuk bahan bakar bersubsidi.

"Ulah oknum yang menyelewengkan minyak tanah bersubsidi ini tak bisa ditolerir lagi, sebab mereka sangat merugikan masyarakat. Mereka yang kedapatan melakukan penimbunan dan menjualnya ke industri-industri harus diproses hukum," kata Masyhur Masie dalam keterangan terpisah.

Sumber SH di Kendari menyebutkan industri yang sering membeli BBM di tingkat pengecer adalah industri yang bergerak di bidang usaha rotan. Sejumlah industri tersebut antara lain Puskud, industri penggorengan rotan di Kecamatan Asera, Moramo, dan Kolono Kabupaten Konawe.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Drs H Amir Manab dalam keterangan terpisah mengakui adanya sejumlah industri yang membeli minyak tanah di tingkat pengecer tersebut.

Namun untuk memberi sanksi tegas terhadap sejumlah industri tersebut, pihaknya belum memiliki bukti-bukti yang kuat. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau belum menemukan langsung industri yang membeli minyak tanah di tingkat pengecer ini," katanya.

Menurut Amir Manab, ulah

sejumlah industri yang membeli minyak dari para pengecer tersebut bermotif mencari keuntungan yang lebih besar. Karena memang, harga minyak di Depot Pertamina yang diberlakukan bagi industri jauh lebih mahal dibanding dengan harga minyak yang disuplai kepada para pengecer, yang menjual minyak untuk kebutuhan rutin masyarakat.

"Perbedaan harga yang cukup menyolok ini, membuat industri menempuh jalan pintas. Mereka, tidak lagi mengambil minyak langsung dari Depot Pertamina, tetapi membeli dari para pengecer untuk mendapatkan keuntungan besar," katanya.

Amir Manab yang juga Ketua tim Pemantau harga kebutuhan pokok masyarakat, mengaku pihaknya kesulitan mengawasi industri yang mengambil minyak dari para pengecer tersebut.

Masalahnya kata dia, antara pengecer dan industri sudah membangun jaringan yang cukup rapih, sehingga sulit dideteksi petugas. "Antara pengecer dan industri ini saling melindungi, karena keduanya sama-sama mencari untung besar. Pengecer cepat habis stok minyaknya, sementara industri memperoleh bahan bakar yang murah," jelasnya.

Pemantauan SH di seputar Kota Kendari, akhir-akhir ini sering terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Akibatnya, bahan bakar yang seharusnya dibeli Rp 1.000 per liter, membengkak menjadi Rp 1.300 sampai Rp 1.400 per liter.

(gus)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
---	--

KODE : LISTRIK MIGAS GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										

HALAMAN : 4 TAHUN 2004

Enam Investor Asing Ingin Investasi di Sektor Migas

DENPASAR - Enam investor asing dari lima negara di bawah koordinasi Waterous and Co kini tengah menjajaki peluang bisnis di sektor minyak dan gas (Migas) yang terdapat di Tanah Air. Keenam investor asing itu masing - masing Murphy Oil, Anadarko (AS), Orient Petroleum (Pakistan), Woodside Petroleum (Australia), MOL (Hongaria) dan Orange Nassau (Belanda). Para pemimpin dari keenam investor ini, sejak Minggu (29/8) sudah datang ke Indonesia guna melakukan penjajakan, dan bertemu dengan pejabat terkait, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, di Bali, Senin (31/8).

Yusgiantoro menjelaskan, keenam investor itu sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor migas yang terdapat di Tanah Air. Untuk itu, tambahnya, sebagai tindak lanjutnya mereka akan kembali mengirim tim ke Indonesia. Tak cuma itu, Yusgiantoro menyebutkan bahwa keenam investor ini juga akan membawa investor lainnya untuk menjajaki peluang investasi migas yang ada di Indonesia. " Ini cukup menggembirakan bagi iklim investasi kita," ujarnya.

Yusgiantoro menambahkan, pihaknya menawarkan seluruh potensi migas yang ada di Indonesia epada investor tersebut, baik yang berada di wilayah barat maupun timur Indonesia. Keenam investor asing tersebut, tambahnya, cukup berpotensi karena memiliki modal investasi mencapai 32 miliar dolar AS. (cmg)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Evalube Kuasai 10 Persen Pasar Pelumas di Jabar

Bandung, Sinar Harapan

Dominasi produk minyak pelumas lokal di pasar Jawa Barat (Jabar) masih sangat besar dibandingkan produk minyak pelumas impor. Salah satu produk minyak pelumas lokal yang mampu berkompetisi di pasar Jabar adalah Evalube. Minyak pelumas yang diproduksi oleh PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) ini mampu menguasai sekitar 10 persen pasar minyak pelumas di Jabar.

"Angka pasti kebutuhan minyak pelumas di Jabar memang tidak ada. Yang jelas kami mampu menguasai 10 persennya," kata Head of Direct Sales Office Evalube Division Bandung, Kun Budi Indriyanto, Selasa (31/8).

Secara nasional kebutuhan minyak pelumas di Indonesia mencapai 670 juta kiloliter/tahun. Kebutuhan ini semakin bertambah seiring dengan per-

tumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Pasar terbesar Evalube sendiri masih di sekitar Jabotabek. Kemudian disusul Makassar, Jateng serta Banjarmasin. Kun membenarkan pasar Jabar masih berada di bawah ke 4 wilayah tersebut.

Sangat Berbeda

Penyebabnya adalah karakter konsumen di Jabar yang sangat berbeda dibandingkan di daerah lain. Menurut Kun karakter konsumen di Jabar banyak mempertimbangkan kualitas. Karakter ini berbeda dibandingkan dengan konsumen di daerah lain yang lebih mengedepankan fanatisme terhadap merek tertentu.

Kun menyatakan untuk mampu bersaing di pasar Jabar, maka pihaknya tidak hanya menawarkan jaminan kualitas

produk. Perluasan jaringan distribusi terus dilakukan. Sehingga dengan cara ini maka produk minyak pelumasnya mampu menembus pasar hingga ke pelosok sekalipun.

Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT WGI, Dewi Aryani Hilman mengatakan secara nasional ada lebih dari 25 ribu bengkel yang memasarkan produk minyak pelumas Evalube. Menurut Dewi untuk meningkatkan pangsa pasar yang telah ada, perluasan distribusi dilakukan termasuk dengan menggandeng pihak ketiga.

Salah satunya adalah PT Pos. Indonesia. "Kami akan mencoba memasarkan minyak pelumas melalui kantor pos. Di beberapa daerah kantor pos masih menjadi pusat transaksi. Peluang ini yang coba kami manfaatkan," jelas Dewi. (dio)

3m

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **31**

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Pemerintah Tak Akan Intervensi Kontrak Exxon

JAKARTA - Keputusan diperpanjang atau tidaknya kontrak kerja sama pengelolaan ladang migas Cepu, Jawa Tengah, melalui *technical assistance contract* (TAC), antara Pertamina dengan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), sepenuhnya merupakan urusan bisnis yang harus diselesaikan sendiri oleh keduanya. Pemerintah tidak akan campur tangan dalam negosiasi tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (30/8). "Sekarang ini sudah jelas, intervensi pemerintah dalam masalah harus dikurangi," katanya.

Dijelaskan, UU No 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) amanatkan agar intervensi pemerintah dalam bisnis migas dikurangi. Sesuai UU Migas, pemerintah hanya berperan sebagai regulator, pembina, dan melakukan pengawasan. Fungsi regulator di lapangan dijalankan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

Dalam kasus Cepu, menurut dia, sebenarnya bisa saja BP Migas memberikan tanggapan asalkan ada laporan dari Pertamina atau EMOI. Namun, setahu dia, hingga saat ini baik Pertamina maupun EMOI belum menyampaikan laporan resmi terkait dengan keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) yang

menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak dengan EMOI.

Sebelumnya, menanggapi keputusan Direksi Pertamina yang tidak akan memperpanjang kontrak pengelolaan ladang migas Cepu setelah tahun 2010, pihak EMOI berencana mendiskusikan masalah tersebut dengan pemerintah. Menyikapi hal itu, Purnomo menegaskan, masalah kontrak EMOI di Cepu sepenuhnya merupakan masalah perseroan, karena ladang migas tersebut termasuk wilayah kerja Pertamina.

Kontrak Jual - Beli LNG

Sementara itu, secara terpisah Kepala BP Migas, Rachmat Sudibyo mengatakan pada Selasa (31/8) ditandatangani kontrak jual beli gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*) antara Beyond Petroleum (BP) Indonesia dengan perusahaan asal Korea, K Power. Kerja sama tersebut akan menyepakati bahwa BP Indonesia, mewakili pemerintah, akan memasok LNG sebanyak 600 ton per tahun dari ladang gas Tangguh, Papua, selama 20 tahun terhitung mulai 2005.

Dalam tahap awal, kontraktraktor bagi hasil asal Inggris itu diharapkan memasok kebutuhan LNG untuk K Power dari Lapangan Bontang. Hal itu karena diperkirakan lapangan Tangguh baru akan berproduksi pada kurun 2007-2008. (H-13)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 6	
TAHUN 2004	

Proyek Tangguh Sumbang Rp 20 Triliun Per Tahun ke Kas Negara

JAKARTA - Mulai 2007 hingga kurun 20 tahun ke depan, ekspor gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) dari Proyek Tangguh, Papua, akan menyumbang Rp 20 triliun per tahun ke kas negara. Setiap tahun Proyek Tangguh diperkirakan mampu meng-ekspor sekitar 7,5 juta ton LNG. Saat ini, sebagai negara pengekspor terbesar LNG, total ekspor LNG Indonesia mencapai sekitar 30 juta ton per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu se usai penandatanganan kontrak jual beli LNG antara BP Indonesia dan K Power di Jakarta, Selasa (31/8). LNG yang akan diekspor ke Korea melalui K Power itu mencapai 800 ton per tahun, untuk jangka waktu 20 tahun.

"Itu jumlah yang cukup besar. Jadi mulai 2007, setelah penandatanganan kontrak dengan Semptra ada tambahan ekspor LNG 7,5 juta ton per tahun yang akan dipasok dari Papua," katanya.

Dijelaskan, selain dengan K Power, pada Juli lalu Beyond Petroleum (BP) juga menandatangani kontrak jual beli LNG dengan Posco. Sesuai kontrak tersebut, mulai 2005, BP setiap tahun harus memasok 550 ribu ton LNG selama 20 tahun. BP juga menyepakati memasok LNG ke Fujian, Cina sebesar 2,6 juta ton per tahun,

selama 25 tahun.

"Dalam waktu dekat, kita harapkan akan ditandatangani kontrak dengan Semptra Energy, untuk memasok LNG ke pantai barat Amerika sebesar 3,7 juta ton per tahun," katanya.

Belum Ada Kepastian

Sementara mengenai sarana transportasi (pengapalan) untuk LNG yang akan diekspor ke Korea, menurut Senior Wakil Presiden Proyek LNG Tangguh, Lukman Mahfoedz, saat ini BP masih mencari tanker dari para kontraktor melalui proses tender. Diharapkan pada bulan ini (September) seluruh proposal peserta tender sudah masuk seluruhnya.

"Saat ini baru dalam tahap pra kualifikasi. Nantinya tanker itu untuk mengirim LNG dari Tangguh ke terminal di Gwangyang, Korea, yang berjarak 2.400 mil. Juga ke Baja, California, dan Meksiko, yang harus ditempuh sejauh 6.700 mil," katanya.

Namun, Lukman menambahkan, selain belum memperoleh tanker yang akan disewa (carter) untuk mengekspor LNG dari Proyek Tangguh, sebenarnya hingga kini BP juga belum memperoleh kepastian mengenai sumber gas untuk memenuhi komitmen ekspor.

"Rencananya gas akan diambil dari ladang gas Tangguh, Papua yang dikelola BP.

Tapi Tangguh baru bisa berproduksi 2008, mundur dari target semula tahun 2007. Itu karena masalah konstruksi, pendanaan proyek, pasar, dan persetujuan perpanjangan blok yang belum diberikan (oleh pemerintah)," katanya.

Meski demikian, Lukman tetap optimis BP mampu memenuhi kebutuhan gas bagi para konsumen yang sudah menandatangani kontrak. Menurut dia, sejauh ini, meski peluangnya sangat kecil, BP berharap masih bisa memperoleh pasokan gas dari Bontang, Kalimantan Timur.

Dia menambahkan, kini BP sedang mengkaji peningkatan produksi, dari 7 juta ton LNG pada rencana awal, menjadi 8 juta ton.

Proyek Tangguh berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua. Proyek tersebut dioperasikan oleh BP Indonesia, dengan saham 37,16 persen. Mitra BP dalam proyek Tangguh, antara lain CNOOC Ltd dengan saham 16,96 persen, MI Berau BV (kini dimiliki oleh Mitsubishi Corporation dan INPEX Corporation) 16,30 persen, Nippon Oil Exploration Berau 12,23 persen, KG Companies (dimiliki oleh Japan National Oil Corporation, Kanematsu Corporation, dan Overseas Petroleum Corporation) 10 persen, serta LNG Japan Corporation (dimiliki oleh Sojitz Corporation dan Sumitomo Corporation) 7,35 persen. (H-13)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

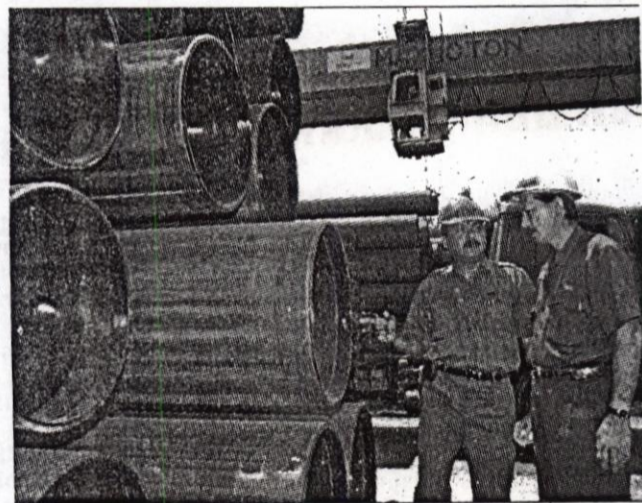
GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **(31)**

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

S I N G K A T



PEMBARUAN / CHARLES ULAG

PIPA BAJA – Presdir PT Bakrie Pipe Industries (BPI) AD Erlangga (kiri) berbincang dengan Direktur PT BPI Amir Ruslan Effendi saat pengiriman perdana pipa-pipa baja pesanan Beyond Petroleum (BP) Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/8). Pipa baja senilai US\$ 12,4 juta tersebut nantinya akan digunakan dalam proyek pisanisasi bawah laut di Laut Jawa.

Bakrie Memenangi Tender Pisanisasi BP di Laut Jawa

PT Bakrie Pipe Industries memenangi tender pengadaan pipa untuk kebutuhan proyek penyaluran gas oleh BP Indonesia. Pipa tersebut akan digunakan untuk pisanisasi bawah laut pada proyek BP di Blok APN yang terletak di Laut Jawa.

Menurut CEO Bakrie Pipe Industries, AD Erlangga dalam keterangannya, Senin (30/8), perusahaannya memenangi tender proyek senilai US\$ 12,4 juta, setelah menyisihkan dua peserta lain dari Korea dan

Jerman. Pipa-pipa yang akan digunakan memiliki panjang kurang lebih 78 kilometer atau setara dengan 15.000 ton. Sebelum akhir tahun ini, pengiriman seluruh pipa diharapkan selesai.

Lapangan BP APN berlokasi sekitar 100 kilometer ke arah timur laut Jakarta, pada kedalaman sekitar 15-45 meter di bawah permukaan laut.

Proyek pengembangan lapangan BP APN meliputi pembangunan tiga anjungan yang dihubungkan oleh jaringan pipa berukuran 24 inci, yang akan mengalirkan gas dari lapangan produksi APN ke jaringan pipa utama untuk kebutuhan pembangkit listrik di Muara Karang. (H-13)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 6 TAHUN 2004	

Sungai Batanghari Surut, Pengangkutan BBM ke Jambi Terhambat

JAMBI - Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Palembang ke Pertamina Jambi melalui Sungai Batanghari macet total sepekan belakangan ini karena surutnya Sungai Batanghari hingga lima meter. Akibatnya pasokan BBM untuk keperluan PLN di Jambi saat ini krisis.

Hal tersebut terungkap pada pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi HA Chalik Saleh dengan Kepala Wira Penjualan Pertamina UPPDN II Jambi, Windrian Kurniawan, di Jambi, Selasa (31/8).

Chalik Saleh mengatakan, akibat terhambatnya pengangkutan BBM melalui sungai ke Jambi, PLN di daerah itu hanya bisa mendapatkan rata-rata 200 kiloliter (kl) so-

lar per hari. Padahal kebutuhan solar untuk PLN di daerah itu mencapai 400 kl per hari. Kekurangan solar itu memaksa PLN setempat melakukan pemadaman listrik secara bergilir.

Sementara itu Kepala Wira Penjualan Pertamina UPPDN II Jambi, Windrian Kurniawan, menjelaskan, terhambatnya pengangkutan BBM dari Palembang ke Jambi melalui Sungai Batanghari, karena surutnya sungai tersebut mencapai lima meter. Kondisi itu menyebabkan kapal tanker Pertamina tidak bisa masuk ke pelabuhan bongkar muat BBM Pertamina wilayah Kasang, Kota Jambi.

Menurut Windrian, kedalaman Sungai Batanghari di kawasan Depo Pertamina Ka-

sang Jambi minimal 3,5 meter agar kapal tanker bisa sandar dan membongkar muatan. Namun saat ini kedalaman sungai sudah di bawah tiga meter, sehingga kapal tanker tidak bisa sandar.

Macetnya pengangkutan BBM melalui sungai, menyebabkan Pertamina kesulitan memenuhi kebutuhan solar untuk PLN. Pengangkutan BBM melalui darat dari Palembang ke Jambi juga sulit dilakukan, karena kapasitas truk tangki BBM umumnya melebihi kekuatan jalan lintas timur Palembang - Jambi.

Kelebihan muatan truk tangki tersebut membuat biaya pengangkutan bertambah, karena adanya pungutan kelebihan muatan di Pos Retribusi Senawar, Sumatera Selatan. (141)